

## E-PARLEMEN: FUNGSI DAN PENERAPANNYA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANDUNG

Jaliludin Muslim<sup>1</sup>, Riva Nazmi Rayani<sup>2</sup>, Salsabila Putri Ariesta Cahyani<sup>3</sup>, Salma Siti Khoirul Jamilah<sup>4</sup>, Santi Agustina<sup>5</sup>, Raehan Athallariq Rifki<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[jaliludin@uinsgd.ac.id](mailto:jaliludin@uinsgd.ac.id)<sup>1</sup>, [rivanazmi2004@gmail.com](mailto:rivanazmi2004@gmail.com)<sup>2</sup>, [slsaaries28@gmail.com](mailto:slsaaries28@gmail.com)<sup>3</sup>, [salmaskj805@gmail.com](mailto:salmaskj805@gmail.com)<sup>4</sup>, [santiagustina673@gmail.com](mailto:santiagustina673@gmail.com)<sup>5</sup>, [raehanathallariqrifki@gmail.com](mailto:raehanathallariqrifki@gmail.com)<sup>6</sup>

**ABSTRACT;** *Advances in information and communication technology have encouraged various innovations, including e-Parliament, which aims to increase transparency, participation and accountability in government governance. This research analyzes the implementation of e-Parliament in the Bandung City Regional People's Representative Council (DPRD), identifies the obstacles faced, and formulates strategic recommendations to increase its effectiveness. Using a qualitative-descriptive approach and case studies, data was collected through in-depth interviews, participant observation and document analysis. The research results show that the main challenges include low community participation, limited human resource capacity, and inadequate technological infrastructure. In addition, a lack of public education and delays in responding to public complaints worsen trust in these platforms. Through thematic analysis with the help of NVivo software, this research reveals that e-Parliament has great potential to support good governance if these challenges can be overcome. Strategic recommendations include strengthening human resource capacity, improving technological infrastructure, and more inclusive public education programs. It is hoped that these findings can contribute to the development of e-Parliament at the local level and become a reference for the DPRD in improving digital-based governance.*

**Keywords:** *E-Parliament, Bandung City DPRD, Governance, Community Participation, Information Technology.*

**ABSTRAK;** Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong berbagai inovasi, termasuk e-Parlemen, yang bertujuan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menganalisis implementasi e-Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Selain itu, kurangnya edukasi publik dan keterlambatan respons terhadap pengaduan masyarakat memperburuk kepercayaan terhadap platform ini. Melalui analisis tematik dengan bantuan

perangkat lunak NVivo, penelitian ini mengungkapkan bahwa e-Parlemen memiliki potensi besar untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik jika tantangan tersebut dapat diatasi. Rekomendasi strategis mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, dan program edukasi publik yang lebih inklusif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan e-Parlemen di tingkat lokal serta menjadi referensi bagi DPRD dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

**Kata Kunci:** E-Parlemen, DPRD Kota Bandung, Tata Kelola Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat, Teknologi Informasi.

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang bagi berbagai sektor pemerintahan untuk mengadopsi sistem digital dalam mendukung transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Salah satu inovasi tersebut adalah e-Parlemen, sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara parlemen dan masyarakat (Nurainy, 2023). Dalam konteks Indonesia, penerapan e-Parlemen, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan langkah strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, meskipun potensi e-Parlemen cukup besar, implementasinya di banyak daerah masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di Kota Bandung (Febrina & Manurung, 2022).

Implementasi e-Parlemen di Indonesia, termasuk di tingkat DPRD, menghadapi berbagai tantangan yang menghambat keberhasilannya. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam e-Parlemen masih sangat rendah. Sebagai contoh, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hanya 0,044% dari total pengguna internet yang terlibat dalam platform e-Parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa e-Culture, atau budaya partisipasi digital, belum sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Rendahnya partisipasi juga dapat disebabkan oleh minimnya edukasi masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan sistem ini. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana platform ini dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi atau mengakses informasi legislasi (A. N. P. Sari & Purbokusumo, 2020).

Di sisi lain, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelola e-Parlemen masih menjadi kendala signifikan. Sebagian besar anggota dewan tidak memiliki pemahaman

yang memadai tentang tujuan strategis dan manfaat jangka panjang dari e-Parlemen. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak memanfaatkan sistem ini secara optimal. Tidak jarang pelatihan atau program peningkatan kapasitas terkait penggunaan teknologi digital bagi anggota dewan diabaikan atau dianggap tidak penting (A. N. P. Sari & Purbokusumo, 2020).

Masalah infrastruktur dan pendanaan juga menjadi hambatan utama dalam implementasi e-Parlemen. Beberapa DPRD, terutama di daerah dengan anggaran terbatas, tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung teknologi interaktif. Koneksi internet yang lambat, kurangnya perangkat teknologi seperti komputer dan perangkat lunak, serta dukungan teknis yang minim semakin memperburuk situasi. Sebagai contoh, di beberapa DPRD, situs web resmi hanya berfungsi sebagai portal informasi yang statis, tanpa menyediakan fitur komunikasi interaktif seperti forum diskusi atau live chat yang dapat digunakan masyarakat untuk berdialog langsung dengan anggota dewan (Suryani, 2015).

Sistem pengaduan daring yang diharapkan menjadi saluran utama untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan juga tidak berfungsi dengan baik. Respons DPRD terhadap pengaduan masyarakat sering kali lambat, dan tidak jarang pengaduan tidak ditindaklanjuti sama sekali. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses penyelesaian pengaduan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas platform e-Parlemen (E. A. R. Sari, 2014).

Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi, dan peningkatan edukasi publik. Dengan langkah-langkah strategis, e-Parlemen memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pemerintahan daerah. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi tantangan dalam implementasi e-Parlemen di Indonesia. Penelitian dari Purwatiningsih (2021) menunjukkan bahwa e-Parlemen dapat meningkatkan transparansi legislatif jika didukung oleh pemahaman teknologi yang baik dari anggota dewan. Studi oleh Febrina & Manurung (2022) juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam memastikan keberhasilan e-Parlemen. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara spesifik membahas konteks DPRD Kota Bandung, terutama dalam menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerapan e-Parlemen.

Meski banyak penelitian membahas e-Parlemen secara umum, terdapat kesenjangan dalam kajian yang berfokus pada penerapan sistem ini di tingkat lokal, seperti di Kota Bandung. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengevaluasi interaksi antara kelembagaan DPRD, infrastruktur teknologi, dan partisipasi masyarakat di Kota Bandung. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji fungsi dan penerapan e-Parlemen di DPRD Kota Bandung serta mengidentifikasi solusi strategis untuk mengatasi kendala yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan penerapan e-Parlemen di DPRD Kota Bandung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi e-Parlemen, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas e-Parlemen. Manfaat dari penelitian ini meliputi aspek akademis, yaitu menambah literatur terkait implementasi e-Parlemen di tingkat lokal; aspek praktis, yaitu memberikan masukan bagi DPRD Kota Bandung dalam mengoptimalkan sistem e-Parlemen; dan aspek kebijakan, yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain fokus kajian yang terbatas pada DPRD Kota Bandung sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk semua DPRD di Indonesia. Selain itu, data partisipasi masyarakat diperoleh melalui metode kualitatif dan dokumentasi, yang mungkin belum mencerminkan gambaran keseluruhan. Penelitian ini juga tidak mencakup analisis mendalam mengenai aspek teknis pengembangan sistem e-Parlemen. Dengan latar belakang, data, dan analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam memahami tantangan dan peluang penerapan e-Parlemen di DPRD Kota Bandung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi e-Parlemen di DPRD Kota Bandung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena, kendala, dan peluang yang dihadapi dalam penerapan e-Parlemen, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai interaksi antara masyarakat, anggota dewan, dan teknologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi rinci terhadap praktik e-Parlemen di DPRD Kota Bandung sebagai locus penelitian. Studi kasus ini mencakup analisis terhadap kebijakan,

infrastruktur, serta interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan e-Parlemen. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik untuk memastikan validitas dan kelengkapan informasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan anggota DPRD, staf pengelola e-Parlemen, dan masyarakat yang menjadi pengguna sistem ini. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana sistem e-Parlemen dioperasikan dan digunakan dalam aktivitas legislatif. Selain itu, dokumen-dokumen terkait seperti laporan tahunan, kebijakan, dan data partisipasi masyarakat dalam e-Parlemen juga dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih luas. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari anggota DPRD Kota Bandung, staf administrasi dan teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan e-Parlemen, serta masyarakat yang pernah menggunakan sistem ini. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam implementasi e-Parlemen.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang dibantu dengan perangkat lunak NVivo untuk memfasilitasi proses pengkodean dan pemetaan tema-tema yang muncul. NVivo memungkinkan analisis data kualitatif secara lebih sistematis dan efisien, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori dan tema yang relevan. Proses ini melibatkan pengkodean data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis dilakukan secara iteratif, dimulai dari pengelompokan data hingga identifikasi pola dan hubungan antar-tema. Hasil analisis tematik ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas e-Parlemen di DPRD Kota Bandung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil dan pembahasan penelitian dimulai dengan analisis data menggunakan metode visualisasi berupa *word cloud*. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata kunci yang paling sering muncul dalam data yang dianalisis, memberikan gambaran awal mengenai isu-isu utama yang relevan dengan topik penelitian. Visualisasi tersebut mempermudah dalam memahami pola dan tema dominan yang muncul, sekaligus menjadi landasan untuk pembahasan lebih mendalam pada bagian berikutnya. *Word cloud* berperan sebagai langkah

awal dalam mengungkap fokus perhatian, frekuensi terminologi, dan keterkaitannya dengan implementasi e-Parlemen di DPRD Kota Bandung.



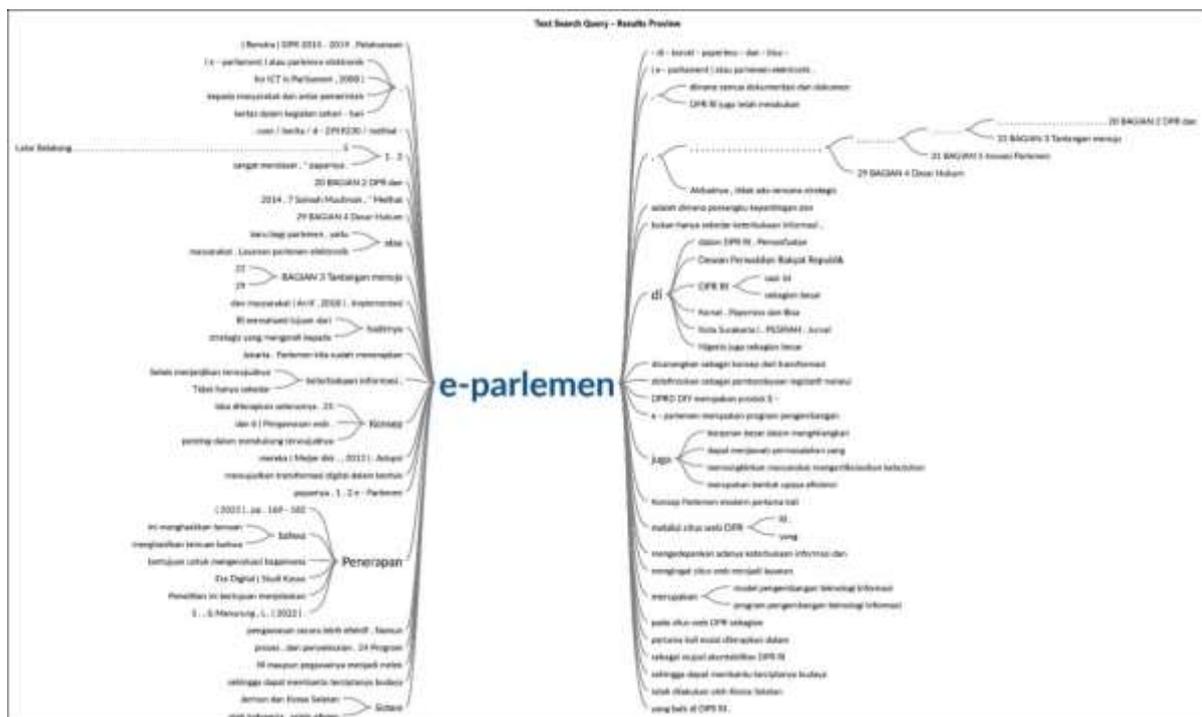
Gambar 1. *Word Cloud*

Sumber: N Vivo, (Diolah Peneliti,2025)

Berdasarkan hasil analisis data yang divisualisasikan ke dalam *word cloud*, terlihat bahwa kata-kata dengan frekuensi tertinggi memberikan gambaran tema utama dari penelitian. Kata-kata seperti "dan" (925 kali), "yang" (629 kali), dan "dalam" (320 kali) mendominasi, mencerminkan peran penting kata penghubung dalam membentuk struktur narasi dokumen. Selain itu, kemunculan kata-kata seperti "pengadilan" (197 kali), "agama" (217 kali), "organisasi" (188 kali), dan "parlement/parlemen" (186/178 kali) mengindikasikan fokus utama penelitian pada isu-isu hukum, tata kelola kelembagaan, dan kebijakan. Istilah seperti "pelaksanaan" (156 kali), "undang" (167 kali), dan "peraturan" (143 kali) menegaskan bahwa penelitian ini berorientasi pada aspek regulasi dan implementasi kebijakan. Adanya kata "informasi" (120 kali) dan "digital" (127 kali) juga menunjukkan keterkaitan dengan teknologi atau sistem informasi modern. Secara keseluruhan, visualisasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang elemen-elemen inti dalam penelitian, seperti hukum, kebijakan, dan teknologi, yang menjadi landasan penting untuk pembahasan lebih lanjut.

Selain analisis *word cloud* yang disajikan di atas, penelitian ini juga berhasil menganalisis data berdasarkan *query text* untuk menggali informasi yang lebih spesifik terkait topik penelitian. Analisis ini memungkinkan identifikasi kata kunci atau frasa tertentu yang

relevan dengan fokus kajian, sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pola-pola linguistik dan keterkaitan antara konsep-konsep utama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hasil dari visualisasi *word cloud* tetapi juga membantu mengeksplorasi bagaimana istilah-istilah tertentu digunakan secara kontekstual dalam data, sehingga dapat mengarahkan pembahasan pada poin-poin strategis yang lebih terperinci. Hasil dari analisis ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut untuk memberikan gambaran komprehensif terkait temuan penelitian.



Gambar 2. Query Text

Sumber: N Vivo, (Diolah Peneliti,2025)

Berdasarkan hasil analisis *Query Text* terkait E-Parlemen yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Nvivo. Analisis ini menunjukkan bahwa kata kunci yang muncul di sebelah kiri, seperti *penerapan*, *konsep*, *keterbukaan informasi*, *hadirnya*, *implementasi*, *tantangan dasar hukum*, dan lainnya, mengindikasikan fokus pada aspek fundamental dalam mengembangkan dan mengoperasikan E-Parlemen. Sementara itu, kata kunci di sebelah kanan, seperti *DPR RI*, *situs web*, *konsep parlemen*, *mengutamakan keterbukaan*, dan *sebagai wujud akuntabilitas*, menegaskan bahwa implementasi E-Parlemen di DPR RI diarahkan untuk menciptakan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan menyediakan akses informasi yang lebih baik melalui platform digital, seperti situs web resmi DPR. Analisis ini juga menyoroti

adanya tantangan utama, termasuk landasan hukum yang perlu diperkuat, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari inisiatif ini sebagai bagian dari reformasi tata kelola parlemen berbasis teknologi.

Selain analisis *word cloud* dan *query text*, berdasarkan data yang berhasil didapat, ditemukan berbagai tantangan atau masalah dalam implementasi E-Parlemen di DPRD Kota Bandung. Implementasi e-Parlemen di DPRD Kota Bandung menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Namun, proses pelaksanaannya masih diwarnai berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan ideal sistem ini. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, di mana sistem e-Parlemen terkendala oleh minimnya perangkat keras seperti komputer, server, dan jaringan internet yang belum memenuhi standar optimal untuk mendukung operasional sistem secara efisien (Febrina & Manurung, 2022).

Situs web resmi DPRD Kota Bandung masih bersifat statis dan lebih berfungsi sebagai portal informasi pasif tanpa fitur interaktif, seperti forum diskusi, sistem konsultasi langsung, atau kanal aspirasi masyarakat secara daring, yang seharusnya menjadi elemen kunci dalam sistem ini. Keterbatasan ini semakin diperparah oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) di DPRD yang belum memadai (Febrina & Manurung, 2022). Sebagian besar anggota dewan dan staf administratif masih kurang memahami pengoperasian dan potensi penuh dari e-Parlemen (Pratami & Subarkah, 2024). Pelatihan yang diselenggarakan sering kali hanya mencakup aspek teknis dasar, seperti cara mengakses dan mengunggah informasi, tanpa membekali pengguna dengan wawasan tentang integrasi teknologi dalam proses legislatif, sehingga penggunaan platform ini terbatas pada kebutuhan administratif sederhana dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan maupun transparansi legislatif (Suwito & Mursyidah, 2021).

Tantangan lain yang muncul adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan platform ini (Febrina & Manurung, 2022). Banyak warga Kota Bandung, terutama dari kalangan usia lanjut atau wilayah dengan akses terbatas, memiliki literasi digital yang rendah, sehingga cenderung memilih menggunakan saluran tradisional seperti pertemuan tatap muka atau media sosial untuk menyampaikan aspirasi mereka (Andriani, 2023). Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait manfaat serta cara penggunaan e-Parlemen semakin

memperburuk situasi, membuat platform ini kurang dikenal dan digunakan. Selain itu, sistem pengaduan daring yang merupakan bagian dari e-Parlemen belum berjalan optimal (Hamid, 2023).

Banyak pengaduan masyarakat yang tidak mendapatkan respons cepat atau bahkan tidak direspons sama sekali, sementara transparansi dalam proses tindak lanjut pengaduan juga masih menjadi isu utama yang mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat besar, karena pengadaan perangkat teknologi yang memadai, pembaruan perangkat lunak, serta penyelenggaraan pelatihan intensif membutuhkan dukungan dana yang cukup besar (Bungalan, 2015). Namun, anggaran yang dialokasikan untuk e-Parlemen di DPRD Kota Bandung masih terbatas, sehingga berbagai kebutuhan ini belum dapat dipenuhi dengan baik. Selain kendala anggaran, kurangnya kebijakan lokal yang secara spesifik mengatur pengembangan dan pengelolaan e-Parlemen menyebabkan pelaksanaannya berjalan tanpa arahan dan integrasi yang jelas, sehingga sulit untuk mencapai hasil yang maksimal (Bungalan, 2015).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, e-Parlemen di DPRD Kota Bandung telah memberikan beberapa manfaat nyata, seperti meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses publik terhadap informasi kegiatan legislatif, termasuk agenda rapat, laporan kinerja, dan rancangan peraturan daerah. Sistem ini juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi dalam pengelolaan data dan dokumen, meskipun dalam beberapa kasus, platform digital ini hanya memfasilitasi komunikasi yang terbatas antara anggota DPRD dan masyarakat melalui media sosial. Namun, manfaat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan publik terhadap sistem e-Parlemen yang seharusnya dapat menjadi jembatan antara legislatif dan masyarakat secara lebih transparan, interaktif, dan partisipatif.

## **Pembahasan**

E-Parlemen, sebagai sebuah sistem digital yang bertujuan untuk memperbaiki proses legislasi dan memperkuat hubungan antara anggota dewan dengan masyarakat, secara ideal memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, e-Parlemen dapat dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan antara proses pemerintahan dengan masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi legislatif, memberikan masukan, serta ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (A. N. P. Sari & Purbokusumo, 2020). Namun, dalam kenyataannya,

implementasi e-Parlemen di DPRD Kota Bandung masih menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara konsep ideal dan realitas di lapangan. Sistem yang ada saat ini, meskipun sudah menyediakan informasi dasar mengenai kegiatan dewan, masih sangat terbatas dalam hal fitur interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses legislasi.

Keterbatasan ini menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan e-Parlemen untuk meningkatkan partisipasi publik secara signifikan. Misalnya, meskipun warga Kota Bandung dapat mengakses informasi tentang pertemuan dewan atau draf peraturan, mereka belum memiliki saluran yang cukup mudah untuk memberikan masukan atau bahkan mengajukan pertanyaan langsung kepada anggota dewan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dapat memberikan informasi, namun belum dapat memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat dan legislatif. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi rendahnya pemanfaatan e-Parlemen (Bustomi, Ariesmansyah, & ..., 2022). Di banyak daerah, termasuk Kota Bandung, masyarakat masih cenderung mengandalkan interaksi tatap muka atau saluran komunikasi tradisional lainnya dalam berhubungan dengan pemerintah. Ini berakar dari kebiasaan dan budaya yang sudah berkembang sejak lama, di mana keterbukaan terhadap teknologi baru masih terbilang rendah. Ditambah lagi dengan tingginya tingkat ketergantungan pada media konvensional, seperti media cetak dan penyiaran, masyarakat sering kali merasa bahwa keterlibatan mereka dalam kegiatan legislatif melalui platform digital tidak begitu penting.

Selain itu, masalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab terbatasnya pemanfaatan e-Parlemen. Banyak warga yang belum terbiasa menggunakan platform digital atau memahami manfaat dari teknologi ini dalam konteks partisipasi politik (Febrina & Manurung, 2022). Literasi digital yang masih rendah ini mengindikasikan bahwa e-Culture, yaitu budaya digital yang mendukung penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, belum sepenuhnya terbentuk di Kota Bandung. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi dalam proses legislatif. Edukasi digital yang menyeluruh harus menjadi prioritas, dengan menyediakan pelatihan dan informasi yang memadai mengenai manfaat penggunaan e-Parlemen dan cara berpartisipasi dalam platform tersebut (Agustini, 2024).

Selain faktor sosial dan budaya, kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi elemen kunci dalam kesuksesan implementasi e-Parlemen. Tanpa pemahaman yang baik mengenai fungsi dan manfaat sistem ini, anggota DPRD dan staf administratif akan kesulitan dalam mengoptimalkan penggunaan e-Parlemen. Oleh karena itu, pelatihan intensif bagi anggota dewan dan staf mengenai cara memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas legislatif mereka sangat penting. Pelatihan ini harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-Parlemen, tetapi juga untuk memahami bagaimana sistem ini dapat meningkatkan kinerja dewan dalam melayani masyarakat, serta bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat secara efektif melalui platform digital.

Di sisi lain, kendala infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dalam implementasi e-Parlemen. Meskipun Kota Bandung memiliki potensi besar untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi, namun keterbatasan perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas internet yang memadai masih menjadi hambatan signifikan. Tanpa adanya infrastruktur yang kuat, sulit bagi e-Parlemen untuk berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam hal anggaran dan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas sistem ini. Investasi dalam infrastruktur digital, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jaringan internet, penyediaan perangkat keras yang memadai, maupun pembaruan perangkat lunak, menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan sistem e-Parlemen yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan ideal dari e-Parlemen yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, perlu adanya pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik. Peningkatan kesadaran digital di kalangan masyarakat, pelatihan bagi anggota dewan dan staf administratif, serta perbaikan infrastruktur teknologi merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh secara simultan untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem e-Parlemen di Kota Bandung.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-Parlemen di DPRD Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan signifikan meskipun telah memberikan beberapa manfaat yang nyata. Sistem e-Parlemen dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi

administrasi, dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi legislatif, sehingga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memahami dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam praktiknya, sistem ini telah berhasil menyediakan akses publik terhadap agenda rapat, rancangan peraturan daerah, dan laporan kinerja DPRD. Namun, berbagai hambatan struktural dan teknis membatasi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan idealnya, yaitu transparansi yang komprehensif, akuntabilitas yang dapat diandalkan, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan inklusif.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum memadai untuk mendukung operasional sistem secara optimal. Perangkat keras seperti komputer, server, dan jaringan internet masih belum memenuhi standar yang diperlukan untuk mengelola platform digital yang andal dan responsif. Selain itu, situs web resmi DPRD Kota Bandung lebih bersifat statis, hanya menyediakan informasi dasar tanpa fitur interaktif seperti forum diskusi atau kanal konsultasi langsung yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat secara nyata. Fitur-fitur tersebut seharusnya menjadi elemen kunci untuk mendukung interaksi yang lebih dinamis antara legislatif dan publik. Selain hambatan teknologi, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di DPRD Kota Bandung juga menjadi isu penting. Sebagian besar anggota DPRD dan staf administratif belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengoperasian dan optimalisasi e-Parlemen. Pelatihan yang diberikan sering kali hanya mencakup aspek teknis dasar, tanpa membekali pengguna dengan kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses legislatif. Akibatnya, pemanfaatan sistem ini terbatas pada kebutuhan administratif sederhana, tanpa menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kualitas transparansi dan akuntabilitas legislatif.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan platform e-Parlemen. Faktor sosial dan budaya, seperti rendahnya literasi digital, masih menjadi hambatan besar bagi masyarakat Kota Bandung dalam memanfaatkan teknologi untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta cara penggunaan e-Parlemen membuat banyak masyarakat lebih memilih saluran tradisional, seperti pertemuan tatap muka atau media sosial, untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, sistem pengaduan daring yang merupakan bagian dari e-Parlemen belum berjalan optimal. Banyak pengaduan yang tidak mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut yang memadai, yang pada akhirnya menurunkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Ketidakseimbangan antara harapan terhadap e-Parlemen sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi, dengan kenyataan implementasi yang masih jauh dari optimal, menunjukkan perlunya perbaikan yang menyeluruh. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya dukungan kebijakan lokal yang spesifik mengatur pengembangan dan pengelolaan e-Parlemen serta keterbatasan anggaran untuk mengatasi masalah infrastruktur dan pelatihan SDM. Kendati demikian, sistem e-Parlemen tetap memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan positif dalam hubungan antara masyarakat dan legislatif jika hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan strategis yang melibatkan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat.

### **Saran**

1. **Peningkatan Infrastruktur Teknologi:** Pemerintah daerah harus memberikan dukungan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas internet. Pengadaan sistem yang andal dan modern akan menjadi dasar penting untuk kelancaran operasional e-Parlemen.
2. **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Pelatihan intensif bagi anggota DPRD dan staf administratif perlu difokuskan pada pemanfaatan teknologi dalam proses legislatif. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga integrasi teknologi dalam pengambilan keputusan dan interaksi dengan masyarakat.
3. **Pengembangan Fitur Interaktif pada Platform:** Platform e-Parlemen harus dikembangkan dengan fitur interaktif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung, seperti forum diskusi, sistem pengaduan daring, dan akses komunikasi dengan anggota dewan. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.
4. **Sosialisasi dan Edukasi Digital Masyarakat:** DPRD Kota Bandung perlu menjalankan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat e-Parlemen. Edukasi digital harus menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat agar lebih terlibat dalam proses legislatif melalui platform ini.
5. **Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung:** Dibutuhkan kebijakan lokal yang lebih spesifik untuk mendukung implementasi e-Parlemen secara efektif, termasuk aturan tentang responsivitas pengaduan daring, alokasi anggaran, dan strategi integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: DPRD Kota Bandung perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi e-Parlemen untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan melakukan perbaikan. Laporan evaluasi yang transparan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AGUSTINI, A. (2024). *E-READINESS DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG*. repository.unsri.ac.id. Retrieved from [https://repository.unsri.ac.id/144462/3/RAMA\\_63201\\_07011182025020\\_0009037604\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/144462/3/RAMA_63201_07011182025020_0009037604_01_front_ref.pdf)
- Andriani, H. (2023). Legislasi dan Kebijakan Negara di Tengah Pandemi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1053–1062. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.425>
- Bungalan, M. (2015). *Inovasi Parlemen Menjawab Tantangan Zaman*.
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & ... (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu ....* Retrieved from <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/5037>
- Febrina, S., & Manurung, L. (2022). Penerapan E-Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 169–182. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23556>
- Hamid, I. (n.d.). Korupsi di parlemen studi terhadap perilaku politik sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) pasca reformasi. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65672>
- Nurainy, R. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang mengalami Masalah Likuiditas Selama Masa ....* dspace.uui.ac.id. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47635>
- Pratami, E. I., & Subarkah, C. (2024). Pengaruh Fungsi Kepemimpinan, Budaya Kerja, Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Sekertariat Dprd. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*. Retrieved from <http://www.jurnal.plb.ac.id/index.php/ekobima/article/view/1949>

- Purwatiningsih, A. P. (2021). Analysis of the Indonesian People Digital Philanthropic Behavior During the Pandemic Based on Income Levels. *International Conference on Islamic Studies* .... Retrieved from <http://103.142.62.229/index.php/icis/article/view/517>
- Sari, A. N. P., & Purbokusumo, Y. (2020). Parlemen Lokal di Era Digital (Studi Kasus Penerapan E-Parlemen Di Kota Surakarta). *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/110402651/6.pdf>
- Sari, E. A. R. (2014). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Serta Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran Dalam Penyusunan APBD (Studi Empiris Pada ... eprints.ums.ac.id. Retrieved from https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/29296*
- Suryani, A. S. (2015). *Jalan Terjal Bersihkan Negeri*. [dprexternal3.dpr.go.id](http://dprexternal3.dpr.go.id). Retrieved from <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/462/359>
- Suwito, A. T., & Mursyidah, L. (2021). Simplification and Automation of the Administration of Public Relations Services at the Secretariat of the DPRD Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Public Policy* .... Retrieved from <https://ijppr.umsida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1140>.